

L K I P
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2018



DINAS SOSIAL KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2019

Jl. Ir. H. Djuanda Komplek Perkantoran

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan ke khadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dapat diselesaikan dalam rangka memenuhi akuntabilitas implementasi program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2018.

LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sepanjang tahun 2018. LKIP ini berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategik yang dilaksanakan pada Tahun 2018, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2017-2022 Untuk Tahun 2018.

Sebagai upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Program dan Kegiatan dapat memberikan kontribusinya, maka perlu dilakukan evaluasi atas kinerja dari masing-masing kegiatan tersebut. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat dijadikan bahan bagi perbaikan kinerja yang konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sesuai dengan lingkup tugas dan perannya masing-masing.

Meskipun kami menyadari LKIP yang disajikan ini masih banyak kekurangannya, namun besar harapan kami laporan ini dapat memberikan sebesar-besar manfaat bagi banyak pihak, baik bagi internal organisasi Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, maupun bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Tasikmalaya, Februari 2019
Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Drs. H. NANA ROSADI, Apt, M.Si
NIP. 19600902 198902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
I K H T I S A R E K S E K U T I F	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.4. Struktur Organisasi	5
1.5. Permasalahan	7
15.1. Kemiskinan	7
15.2. Keterlantaran	8
15.3. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku	8
15.4. Kecacatan	9
15.5. Korban Bencana	9
15.6. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi	10
1.6. Sistematika Laporan	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1. Rencana Strategis	13
2.1.1. Visi dan Misi	13
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	14
2.1.3. Strategi dan Kebijakan	15
2.2. Perjanjian Kinerja	16
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
2.4. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2017	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21
3.2. Capaian Kinerja Organisasi	23
3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial	23
3.2.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	23
3.2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan tahun 2016	24
3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra	24
3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.	25

3.2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	
Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	27
BAB IV PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel I.I Struktur Organisasi	6
Tabel. 1.2 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota	10
Tabel. 1.3 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	11
Tabel 2.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017	16
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Tasikmalaya	17
Tabel 3.1 Rentang Nilai Hasil Pengukuran Kinerja Predikat Nilai Warna.....	22
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016.....	24
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Renstra	24
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2017	26
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2017	26
Tabel 3.6 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran	27
Tabel 3.7 Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) Tahun Anggaran 2017	29

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2018 yang merupakan tahun Pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya periode tahun 2017-2022 Untuk Tahun 2018.

Laporan ini berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya yang telah dilakukan dan tingkat capaian dari target sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan LKIP ini disajikan tentang indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran, tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja, sehingga diperlukan pola pengukuran kinerja mulai rencana strategis dan berakhir sampai dengan pengukuran kinerja atas sasaran program kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Pada tahun anggaran 2018 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mempunyai 4 (empat) sasaran strategis dan tujuan yang kemudian dijabarkan kedalam 11 (Sebelas) program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Secara kumulatif capaian target kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 mencapai tingkat persentase 99.58%.

Dengan memperhatikan tingkat capaian kinerja tersebut, perlu dilakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang belum dilaksanakan secara optimal sebagai bagian yang terintegrasi dalam suatu upaya konstruktif dan berkelanjutan guna mengoptimalkan kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya pada tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai instansi pemerintah diwajibkan melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian Visi, Misi dan Tujuan organisasi yang telah ditetapkan tersebut.

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, maka disusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat serta ikhtisar pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dimaksudkan juga sebagai:

- Bahan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
- Bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

- Bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan
- Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013
13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005;

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
21. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017.
22. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang sosial, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial serta pelayanan umum di bidang sosial.
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas.
- f. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas dinas.
- g. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor.
- h. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial, sesuai dengan kewenangan Daerah.
- i. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- j. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- k. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan
- l. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang sosial.
- m. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang sosial, dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

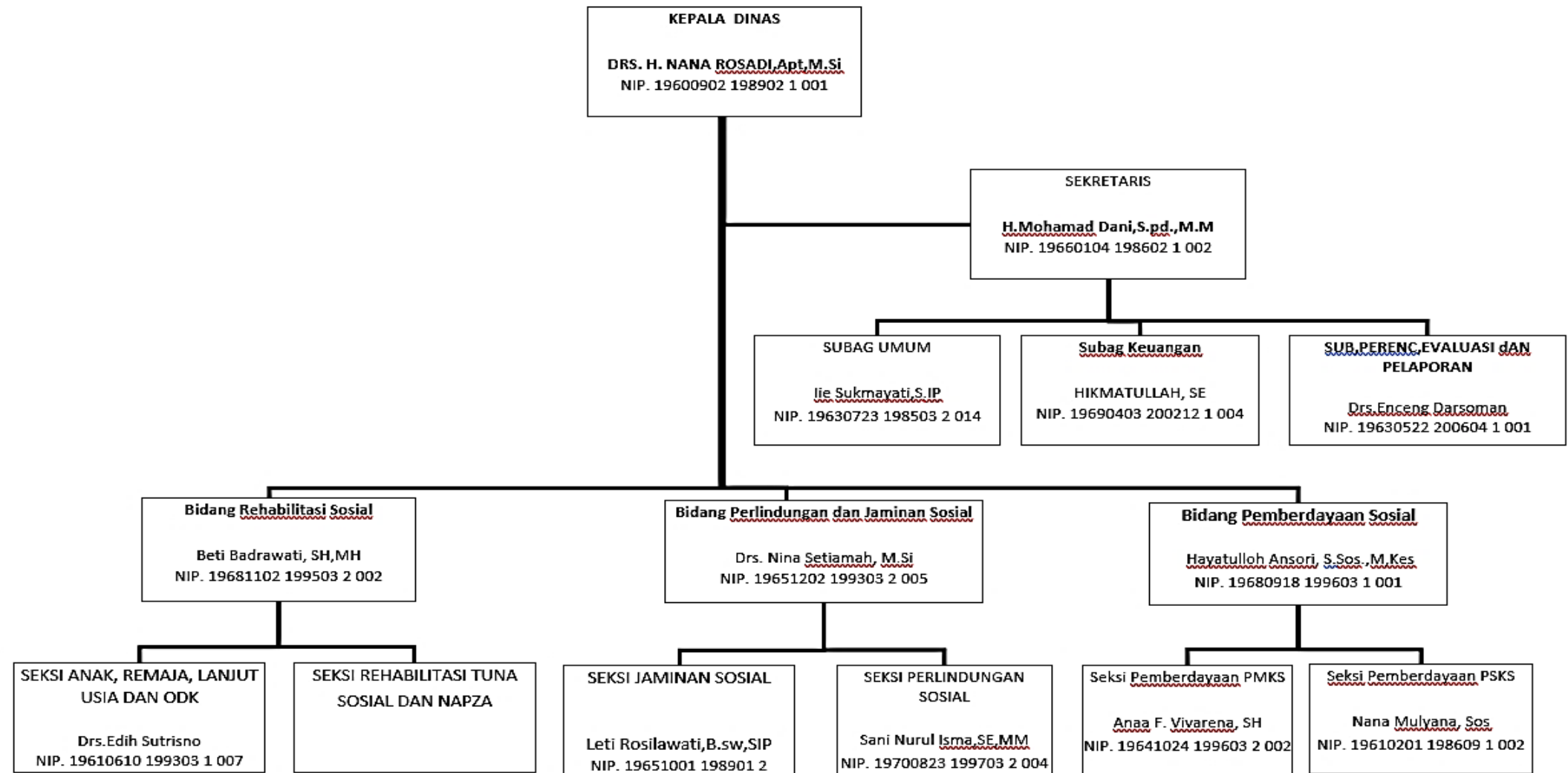
1.4. Struktur Organisasi

Tugas Pokok dan Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya diatur dengan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 60 Tahun 2016 Tentang

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Sosial Kota Tasikmalaya..

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pemberdayaan sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
 - b. Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
4. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak, Remaja, Lanjut Usia dan ODK;
 - b. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Nafza
5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - a. Seksi Perlindungan Sosial;
 - b. Seksi Jaminan Sosial.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1.1
Struktur Organisasi



1.5. Permasalahan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang terdapat di Kota Tasikmalaya dapat dikategorikan atas 6 (enam) kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian secara serius, yakni kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Permasalahan sosial tersebut dialami oleh anak, keluarga komunitas dan masyarakat yang mengalami hambatan fungsi sosial (disfungsi sosial), antara lain:

- a. Hambatan fisik, misalnya kecacatan fisik, kecacatan mental;
- b. Hambatan pengetahuan, misalnya kebodohan, kekurangtahuan informasi;
- c. Hambatan keterampilan, misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja;
- d. Hambatan mental/sosial psikologis, misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stres, '*shock culture*';
- e. Hambatan budaya, misalnya mempertahankan tradisi yang kurang mendukung kemajuan sosial/modernisasi, misalnya apatisme, skeptis, fatalistik, dan lemah karsa (tidak mempunyai motivasi dan kemauan untuk maju);
- f. Hambatan kelembagaan pelayanan sosial misalnya ditandai dengan belum dimilikinya fasilitas dasar pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Pelayanan kesejahteraan sosial ditujukan untuk memberikan jaminan sosial (*social security*) bagi peningkatan fungsi sosial anak, keluarga dan komunitas agar aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dapat diperoleh atau ditingkatkan sehingga kualitas hidup dan taraf kesejahteraan masyarakat dapat semakin meningkat. Secara spesifik permasalahan sosial diuraikan berikut ini:

15.1. Kemiskinan

Pada dasarnya, masalah kemiskinan adalah kurang atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tidak tersedianya lapangan kerja dapat mengakibatkan pengangguran dan pengangguran mengakibatkan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan telah mengakibatkan timbulnya masalah-masalah sosial lainnya yang lebih nyata dan lebih luas seperti keterlantaran, ketunaan sosial, kriminalitas tindakan anti sosial yang dipicu oleh gangguan psikososial. Permasalahan sosial yang terjadi pada masyarakat, bukan hanya akibat dari adanya penyimpangan perilaku atau masalah kepribadian, juga sebagai akibat masalah struktural, kebijakan yang keliru, implementasi kebijakan yang tidak konsisten dan tidak adanya partisipasi komunitas dan masyarakat dalam pembangunan.

Keluarga fakir miskin pada umumnya berada dalam kondisi rumah dan lingkungan yang kumuh atau kotor, tidak teratur, tidak sehat serta tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal baik secara fisik, kesehatan maupun sosial, sehingga fungsi sosial keluarga tidak dapat dilaksanakan secara wajar. Berdasarkan hasil pendataan PMKS atau verifikasi dan Validasi Basis Data terpadu di Kota Tasikmalaya Tahun 2018, tercatat jumlah *fakir miskin* sebanyak *75.071 Rumah Tangga*.

15.2. Keterlantaran

Masalah keterlantaran dapat dialami oleh balita, anak dan remaja, pekerja migran yang terkena PHK, suami atau istri yang ditinggalkan pasangannya (*single parent*) dan lanjut usia. Keterlantaran terjadi karena kelalaian dan atau ketidakmampuan orang tua atau keluarga dalam melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan jasmaniah, rohaniah maupun sosial mereka tidak terpenuhi secara wajar.

Berdasarkan hasil pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2018, tercatat ada 405 Anak terlantar, *39 anak balita terlantar* dan 15297 orang *lanjut usia terlantar yang belum tersentuh oleh bantuan Sosial*. Kenyataan itu akan berdampak pada tuntutan peningkatan kemampuan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab sosial anggota keluarganya.

15.3. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku terus menunjukkan peningkatan karena arus urbanisasi yang terjadi seiring modernisasi dan industrialisasi terutama di daerah perkotaan. Di samping itu dengan semakin sulitnya kehidupan di pedesaan sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang makin meningkat dan lahan garapan yang semakin berkurang dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat oleh masyarakat desa. Hal ini menyebabkan mereka harus mencari kesempatan hidup yang diduga lebih baik di kota. Ketidakmampuan mereka untuk menyesuaikan diri di kota karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor ketenagakerjaan formal maupun informal.

Berdasarkan hasil pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2018, masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku terdiri dari *gelandangan* sebanyak 51 orang, *pengemis* sebanyak 49 orang, *pemulung* sebanyak 509 orang, *wanita tuna susila* sebanyak 401 orang, *orang dengan HIV/AIDS (ODHA)* sebanyak 448 orang, *korban penyalahgunaan narkoba/napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif)* sebanyak 58 orang, *bekas warga binaan lembaga permasyarakatan* 113 orang, *187 orang anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum* 46 orang, *keluarga bermasalah sosial psikologis* 0 orang dan *kelompok minoritas* sebanyak 1708. Kondisi seperti ini berpotensi meningkatkan

kerawanan masalah sosial lainnya yang lebih kompleks, seperti kriminalitas, pelanggaran ketertiban dan tindakan melawan hukum.

15.4. Kecacatan

Kecacatan adalah hilangnya atau abnormalnya fungsi atau struktur anatomi, psikologi maupun fisiologi seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, penyandang cacat diklasifikasikan dalam tiga jenis kecacatan yaitu cacat fisik, cacat mental serta cacat fisik dan cacat mental yang dikenal dengan "cacat ganda". Berdasarkan hasil pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2018, terdapat *penyandang disabilitas* sebanyak 2878 orang dan *anak dengan kedisabilitasan* sebanyak 139 orang.

15.5. Korban Bencana

Kondisi geografis Indonesia terbentuk kepulauan yang tersebar luas dan dipersatukan oleh laut-laut di antara pulau-pulau. Namun karena terbatasnya sarana komunikasi dan angkutan menjadi kendala dalam upaya penanggulangan bencana.

Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Dengan demikian, korban bencana dapat digolongkan ke dalam 2 jenis, yaitu korban bencana alam dan korban bencana sosial. Berdasarkan Pengaduan Masyarakat terdapat 149 Keluarga *korban bencana alam* dan 0 orang *korban bencana sosial*.

15.6. Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

Permasalahan tindak kekerasan, terutama terhadap anak-anak, wanita dan lanjut usia, baik yang terjadi dalam keluarga maupun di masyarakat yang hingga saat ini masih belum tersentuh oleh peraturan perundangan dan penanganan yang memadai. Dampak sosial dari perkembangan industri dan kemiskinan mengakibatkan munculnya tekanan psikologis dan mengakibatkan kemampuan adaptasi yang berbeda, sehingga diantaranya ada yang mengalami depresi ataupun stres. Berdasarkan hasil pendataan PMKS di Kota Tasikmalaya Tahun 2018 tercatat *anak yang memerlukan perlindungan khusus* sebanyak 18 orang, *anak yang menjadi korban tindak kekerasan* sebanyak 13 orang, *korban tindak kekerasan* sebanyak 1 orang, *korban trafficking* sebanyak 1 orang dan *pekerja migran bermasalah* sebanyak 4 orang.

Secara terperinci data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial tertuang dalam Tabel Berikut ini.

Tabel 1.1. Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Berdasarkan Hasil Pendataan 2018

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	39
2	Anak Terlantar	405
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	46
4	Anak Jalanan	187
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	139
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	13
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	18
8	Lanjut Usia Terlantar	15297
9	Penyandang Disabilitas	2878
10	Tuna Susila	115
11	Tuna Susila	401
12	Gelandangan	51
13	Pengemis	49
14	Pemulung	509
15	Kelompok minoritas	1708
16	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	113

17	Orang dengan HIV / AIDS (ODHA)	448
18	Korban Penyalahgunaan NAFZA	58
19	Korban Trafficking	1
20	Korban tindak kekerasan	1
21	Pekerja Migran Bermasalah	4
22	Korban Bencana Alam	149
23	Fakir Miskin	75071
24	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	6619
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	
26	Orang Dengan Gangguan Jiwa	204

1.6. Stake Holder Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Selain banyaknya permasalahan yang menjadi Beban Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, terdapat mitra kerja yang mana mitra kerja tersebut tergabung dalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

Secara terperinci data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 1.2
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Tasikmalaya

No	Jenis PSKS	Jumlah		Total
		L	P	
1	Pekerja Sosial Profesional	-	-	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	50	19	69
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	18	2	20
4	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LKS)	-	-	110
5	Karang Taruna (KT)	-	-	69
6	Lembaga Kesejahteraan Keluarga	-	-	1
7	Keluarga Pioner	-	-	4
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKS KBM)	-	-	-
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)	-	21	21
10	Penyuluh Sosial	-	-	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4	6	10

1.7. Sistematika Laporan

LAKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan gambaran umum organisasi dan pengantar lainnya berisikan latar belakang, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dinas, struktur organisasi serta sistematika penyusunan laporan.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Berisi ikhtisar beberapa hal penting meliputi rencana strategis serta perjanjian kinerja tahun 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisikan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran strategis melalui pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.

BAB IV PENUTUP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholder* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan tantangan/kendala (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Sebagai sebuah instansi pemerintah, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya memiliki rencana strategis (renstra) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2017-2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis tersebut.

2.2. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi di Kota Tasikmalaya adalah Meningkatkan kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang lebih baik.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun sasaran yang mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, yaitu

“Meningkatnya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)”

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran

Tujuan	
1. Meningkatnya Penanganan dan Bantuan Bagi PMKS 2. Meningkatnya pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS	
Sasaran	Program
Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi	1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial. 2. Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap Fakir Miskin dan PMKS lainnya	3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Meningkatnya pemberdayaan sosial Bagi PSKS	4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

2.1.1 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut maka ditentukan beberapa strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan Jaminan Perlindungan Sosial.
- Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh.
-

b. Kebijakan

Sedangkan kebijakan yang diambil untuk mencapai tujuan di atas adalah Meningkatkan penanganan PMKS secara menyeluruh dengan melibatkan masyarakat.

2.3. Perjanjian Kinerja

Dalam mengantisipasi isu strategis, permasalahan serta sejalan dengan rumusan RPJMD Kota Tasikmalaya 2017-2022, maka dalam perjanjian kinerja tahun 2018 Dinas Sosial, Kota Tasikmalaya akan mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Orang dengan Kedisabilitas	4.38%
	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Tuna Sosial	9.97%
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial Terhadap PMKS	100%
	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	100%
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS dan PSKS	Persentase Fakir Miskin dan PMKS Lainnya yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	0.19%
	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	100%
Meningkatnya kualitas kesekretariatan dengan mengarahkan aparatur pada pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah	100%

2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Perjanjian Kinerja di atas berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Tahun 2018-2022. Adapun formulasi IKU pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN PENJELASAN	FORMULASI		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya PMKS yang Mendapat Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak, Remaja, Lanjut Usia dan Orang dengan Kedisabilitas	%	Penanganan PMKS Jenis Keterlantaran	Jumlah PMKS Cluster Keterlantaran/ jumlah yang ditangani	X 100	Bidang Rehabilitasi Sosial	Kadis
		Persentase Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Tuna Sosial	%	Penanganan PMKS Ketunaan Sosial	Jumlah PMKS Cluster Ketunas sosial/ jumlah yang ditangani	X 100	Bidang Rehabilitasi Sosial	
2	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial Terhadap PMKS	%	Untuk mengukur sejauh mana Capaian Perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Jumlah Pengaduan /Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti	X 100	Bidang Linjamsos	Kadis

		Capaian Penanganan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Sosial	%	Untuk mengukur sejauh mana Capaian Penanganan Pasca Bencana Alam	Jumlah Laporan Bencana/Laporan yang di tangani	X 100	Bidang Linjamsos	Kadis
3	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial Terhadap PMKS dan PSKS	Persentase Fakir Miskin dan PMKS Lainnya yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	Untuk Mengukur Capaian Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS	Jumlah Fakir Miskin /Fakir miskin yang berwirausaha	X 100	Bidang Dayasos	Kadis
		Persentase PSKS yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	Untuk Mengukur Partisipasi PSKS dalam Penanganan PMKS	Jumlah PSKS yang dibina/ Data PSKS	X 100	Bidang Dayasos	Kadis
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah	%	Untuk Mengukur Kinerja PD			Sekretariat	Kadis

2.5. PERENCANAAN ANGGARAN TAHUN 2018

Dari sasaran dengan indikator yang diperjanjikan, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya akan mewujudkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS
2. Meningkatnyapemberdayaan sosial terhadap Fakir Miskin dan
3. Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi PMKS lainnya
4. Meningkatnya pemberdayaan sosial Bagi PSKS

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan sasaran pada tujuan dan sasaran tersebut adalah :

1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial terdiri dari :
 - a. Kegiatan penanganan orang terlantar diperjalanan. Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 60.630.000 (Enam Puluh Juta Enam Ratus tiga Puluh Ribu Rupiah) keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah orang terlantar yang Jumlah orang terlantar yang melapor mendapatkan penanganan dan dipulangkan kedaerah asalnya, dengan Capaian sebanyak 250 Orang.
 - b. Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) . Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini adalah Jumlah Anggota TAGANA Kota Tasikmalaya yang siap siaga dalam penanggulangan bencana, dengan Capaian sebanyak 40 Orang.
 - c. Penyelenggaraan rumah singgah, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rumah Singgah, dengan Capaian sebanyak 12 Bulan.
 - d. Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 25.000.000 (*Dua Puluh Lima juta Rupiah*) keluaran dari kegiatan ini adalah

- Terpenuhinya pemahaman undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang di perusahaan,
- e. Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Penyandang Disabilitas yang di dampingi, dengan Capaian sebanyak 30 Orang.
 - f. Pembinaan bagi anak terlantar, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Anak terlantar yang dibina, dengan Capaian sebanyak 30 Orang.
 - g. Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 1.300.000.000 (satu milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Data PMKS yang Valid dan Update, dengan Capaian sebanyak 1 Data.
 - h. Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Pelayanan Homcare, dengan Capaian sebanyak 40 Orang.
 - i. Komisi Daerah Lanjut Usia, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Lanjut Usia yang mengikuti Peringatan Hari Lanjut Usia, dengan Capaian sebanyak 500 Orang.
 - j. Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Remaja putus Sekolah yang Mendapat Pelatihan Keterampilan, dengan Capaian sebanyak 38 Orang.
 - k. Sosialisasi Akseibilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Alat Bantu yang diberikan, dengan Capaian sebanyak 36 Unit.
 - l. Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) keluaran

dari kegiatan ini Jumlah Lanjut Usia yang mendapat Akses Pelayanan dasar, dengan Capaian sebanyak 20 Orang.

- m. Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Yayasan yang mendapatkan Pemahaman tentang pengelolaan Bansos dan Hibah, dengan Capaian sebanyak 100 Orang/yayasan.

2. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 217.114.000 (Dua Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Karang Taruna Yang Mendapat Pemberdayaan/Pelatihan Perbngkelan, dengan Capaian sebanyak 98 Orang.
- b. Kemah Bakti Karang Taruna, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti, dengan Capaian sebanyak 138 Orang.

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya terdiri dari :

- a. Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 463.849.500 (Empat Ratus Enampuluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Terselenggaranya Fasilitas Untuk Unit dan pengelola Program Keluarga Harapan di Kota Tasikmalaya, dengan Capaian sebanyak 12 Bulan.
- b. Pelatihan/Pembinaan Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang berwirausaha, dengan Capaian sebanyak 13 Orang.

- c. Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 62.000.000 (Enam Puluh Dua Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah PSKS yang dibina, dengan Capaian sebanyak 79 Orang.
 - d. Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK), Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang memiliki keterampilan pembuatan pakan ikan, pangkas rambut dan tata boga, dengan Capaian sebanyak 120 Orang.
 - e. Pelayanan Terpadu Disabilitas, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Disabilitas yang mendapat pelayanan terpadu, dengan Capaian sebanyak 100 Orang.
4. Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal terdiri dari :
- a. Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Dokumen ISO, dengan Capaian sebanyak 2 Dokumen.
 - b. Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang ditertiban, dengan Capaian sebanyak 100 Orang.
5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari :
- c. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, Alokasi Anggaran kegiatan ini adalah Rp. 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) keluaran dari kegiatan ini Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, dengan Capaian sebanyak 100%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Sosial Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Renja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh

program dan kegiatan yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang dicapai atau realisasi kinerja. LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Pengukuran kinerja kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya yaitu menggunakan indikator kinerja kegiatan, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang berasal dari system informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya, sedangkan data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas sosial Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data capaian kinerja untuk indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari indikator-indikator masukan, keluaran dan hasil, dilakukan secara terencana dan sistematis setiap tahun untuk mengukur kehematan, efektivitas, efisiensi dan kualitas pencapaian sasaran. Sedangkan pengumpulan data kinerja untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) diukur pada akhir periode selesainya seluruh program/kegiatan dalam rangka mengukur keberhasilan dari Dinas Sosial. Pengukuran Kinerja mencakup:

- a. Tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama yang merupakan tingkat keberhasilan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan Sosial;
- b. Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan Perhitungan persentase pencapaian target memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100$$

LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Hasil pengukuran menunjukkan kinerja yang telah dicapai dengan *range* nilai 0 – 100 yang ditunjukkan dalam warna, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rentang Nilai Hasil Pengukuran Kinerja
Predikat Nilai Warna

PREDIKAT	NILAI	WARNA
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

32.1. Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan, yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosil Kota Tasikmalaya. Tahun 2018 merupakan tahun pertama dalam Periode Renstra Dinas Sosial Kota Tasikmalaya 2017 – 2022 Untuk Tahun 2018. Secara keseluruhan capaian target indikator kinerja tahun 2018 berdasarkan hasil pengukuran Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Tasikmalaya mencapai rata-rata sebesar 86.91%

3.2.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Persasaran
Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas	4.38	4.34	99.11%	95.60
	Persentase rehsbilitsi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial	9.27	8.53	92.08	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	100	100	100	100
	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosia	100	100	100	
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS	Persentase PMKS yang Meningkatkan Tarap Ekonominya	0.19	0.18	94.74	65.14
	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100	35.55	35.55	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai capaian kinerja penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah	100	100	100	100

Formulasi Penjelasan table 3.2

1. Pencapaian realisasi fisik 4.34 dari sasaran Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial dengan indikator Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas apabila dilihat dari jumlah PMKS keterlantaran terdapat sebanyak 18767, target pada tahun 2018 adalah 4.38% atau sebanyak 750 oarng, pencapaian target pada tahun 2018 sebanyak 744 orang yaitu 4.34 persen atau 99.11 Persen.
2. Pencapaian realisasi fisik 8.53 dari sasaran Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial dengan indikator Persentase rehsbilitsi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial apabila dilihat dari jumlah PMKS Ketunaan terdapat sebanyak 1629, target pada tahun 2018 adalah 9.27% atau sebanyak 146 oarng, pencapaian target pada tahun 2018 sebanyak 135 orang yaitu 8.53 persen atau 92.08 Persen.
3. Pencapaian realisasi fisi 100 dari sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS dengan indikator Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS. apabila dilihat dari jumlah PMKS yang melakukan pengaduan terhadap dinas sosial yitu sebanyak 222 orang dan semuanya pengaduan tersebut ditindak lanjuti.
4. Pencapaian realisasi fisik 100 dari sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS dengan indikator Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosia. apabila dilihat dari jumlah Laporan kejadian bencana alam sebanyak 37 laporan dan semua laporan tersrebut di tinjau kelapangan untuk dilakuakn penanganan Pasca Bencana Alam.
5. Pencapaian realisasi fisik 0.18% dari sasaran Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS dengan indikator Persentase PMKS yang Meningkatkan Tarap Ekonominya apabila dilihat dari jumlah PMKS Kemiskinan yaitu sebanyak 73159, target pada tahun 2018 adalah 0.19% atau sebanyak 140 oarng, pencapaian target pada tahun 2018 sebanyak 131 orang yaitu 0.18 persen atau 94.7 Persen.
6. Pencapaian realisasi fisik 0.18% dari sasaran Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS dengan indikator Persentase PSKS yang

mendapatkan pemberdayaan sosial apabila dilihat dari jumlah PSKS yaitu sebanyak 886, target pada tahun 2018 adalah 100% , pencapaian target pada tahun 2018 sebanyak 315 orang yaitu 35.55%

3.2.1.2 erbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan tahun 2017

Capaian Kinerja sasaran pada tahun 2018 yaitu 86.91% , semntara capaian pada tahun 2017 yaitu 70%. apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 16.91% semntara peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 hanya 0.50%

3.2.1.3 Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target Renstra

Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2018
dengan Target Renstra

SASARAN STRTEGIS	Indikator Kinerja Utama	Tahun					
		Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas	4.38	4.34	5.38	10.76	16.20	21.53
	Persentase rehsbilitsi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial	9.27	8.53	13.8	27.6	41.4	55.2
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	100	100	100	100	100	100

Sosial bagi PMKS	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosia	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS	Persentase PMKS yang Meningkatkan Tarap Ekonominya	14.19	14.18	14.53	15.06	15.61	16.13
	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100	35.55	100	100	100	100

32.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Secara umum pencapaian kinerja untuk dua sasaran pada tahun 2018 ini mencapai 86.91., Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja sangat baik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab-penyebab antara lain ;

1. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil

Selanjutnya beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Sumber daya Manusia Pada dinas sosial tahun 2017 hanya 19 orang, maka dibutuhkan tambahan SDM ASN Sebanyak sekian orang untuk mengisi kekosongan sesuai dengan tupoksi yang ada.
- b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2018 akan dibangun sistem data base terpadu (Basis Data Terpadu) dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- c. Indikator pada level impact dan Outcome pada umumnya bersifat fisik, sementara ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan umumnya hanya dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level impact dan Outcome kadang sulit tercapai.
- d. Keterebatasan pagu anggaran yang ditetapkan sangatlah sehingga sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.

Untuk sasaran Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial pada Tahun 2018 dengan capaian sebesar 95.60 % Predikat sangat memuaskan , dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya PMKS
Yang Mendapat Rehabilitasi Sosial Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Persasaran
Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas	4.38	4.34	95.60
	Persentase rehsbilitsi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial	9.27	8.53	

Indikator Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap anak, remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas di Tahun 2018 dengan target 4.38%, persentase pencapaian target untuk indikator ini adalah sebesar 99.11 %.

Indikator Persentase rehsbilitsi sosial terhadap Penyandang Tuna Sosial di Tahun 2018 dengan target 9.27%, persentase pencapaian target untuk indikator ini adalah sebesar 92.08 %.

Untuk sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS pada Tahun 2018 dengan capaian sebesar 100 % dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2017

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Persasaran
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS	100	100	100
	Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial	100	100	

Indikator Persentase Capaian Jaminan Sosial terhadap PMKS dan Capaian Penanganan Perlindungan Sosial korban bencana alam dan korban sosial di Tahun 2018 dengan target masing-masing 100%, persentase pencapaian target untuk indikator ini adalah masing-masing sebesar 100 %, Karena pada Tahun 2018 semua pengaduan dan laporan bencana alam semuanya ditindak lanjuti dan ditangani.

Untuk sasaran Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS pada Tahun 2018 dengan capaian sebesar 65.14 % dengan uraian sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Persasaran
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS	Persentase PMKS yang Meningkatkan Tarap Ekonominya	0.19	0.18	65.14
	Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100	35.55	

Indikator Persentase PMKS yang Meningkatkan Tarap Ekonominya di Tahun 2018 dengan target 0.19%, persentase pencapaian target untuk indikator ini adalah masing-masing sebesar 94.74 %, Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari ketpat sasaran program yang mengacu pada basis data terpadu

Indikator Persentase PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial di Tahun 2018 dengan target 100%, persentase pencapaian target untuk indikator ini adalah masing-masing sebesar 35.55 %, ketidak berhasilan tersebut Karena pada Tahun 2018 Tidak semua PSKS terkaomodir, selain itu ada beberapa kegiatan yang dialokasikan kepada salahsatu PSKS yang tidak ada unkitannya terhadap partisipasi penanganan PMKS

32.3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Secara menyeluruh, pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 dapat dikatakan sangat Baik walaupun terdapat beberapa sasaran yang tidak mencapai target. Kondisi ini tidak terlepas dari penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran terkait. Berikut adalah tabel sasaran kinerja yang telah berhasil dicapai beserta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja tersebut:

Tabel 3.6
Program Dan Kegiatan Yang Menunjang
Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN	CAPAIAN	PROGRAM	KEGIATAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
			Penyediaan Alat Tulis Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
			Penyediaan Makanan dan Minuman
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
			Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan
			Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai
			Program Peningkatan
			Pengadaan Meubelair

		Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
			Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur
			Pengadaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
			Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran
			Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun
		Program Perencanaan Kerja	Penyusunan Rencana Kerja
			Penyusunan Rencana Strategis
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Sosial
Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan			
Meningkatnya PMKS yang mendapat rehabilitasi sosial	95.60	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penanganan Orang Terlantar diperjalanan
			Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
			Penyelenggaraan rumah singgah
			Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan
			Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat

			Pembinaan bagi anak terlantar
			Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya
			Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia
			Komisi Daerah Lanjut Usia
			Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana
			Sosialisasi Aksesibilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat
			Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo
			Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018
		Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial
			Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PMKS	100	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan
			Pelatihan/Pembinaan Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya pemberdayaan sosial terhadap PMKS dan PSKS	65.14		Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
			Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)

			Pelayanan Terpadu Disabilitas
		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna
			Kemah Bakti Karang Taruna

Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh 11 Program melalui 56 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp 5.702.484.000 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 5.375.434.237 atau 94,26% dan realisasi fisik sebesar 99,58%.

Adapun realisasi capaian keuangan program/kegiatan tahun anggaran 2018 yang termasuk dalam belanja langsung non urusan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) Tahun Anggaran 2017

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	765,376,500	739,195,056	97%	99%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	1,545,000	77%	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	53,400,000	34,962,473	65%	100%
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2,660,000	2,660,000	100%	100%
4	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	20,000,000	19,546,625	98%	100%
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	14,490,000	11,979,300	83%	100%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	115,116,000	112,682,000	98%	100%
7	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	25,020,000	24,719,000	99%	100%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
8	Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,200,000	40,141,800	100%	100%
9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19,680,000	19,325,500	98%	99%
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,000,000	6,000,000	100%	100%
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30,616,500	30,370,300	99%	100%
12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12,736,000	12,736,000	100%	100%
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	10,640,000	10,310,000	97%	100%
14	Penyediaan Makanan dan Minuman	33,100,000	33,097,000	100%	100%
15	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	242,000,000	241,616,058	100%	95%
16	Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	134,968,000	134,904,000	100%	95%
17	Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai	2,750,000	2,600,000	95%	100%
No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	785,014,000	764,620,715	97%	100.00%
1	Pengadaan Mobil Jabatan	282,000,000	282,000,000	100%	100%
2	Pengadaan Meubelair	28,498,000	28,371,200	100%	100%
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	80,000,000	79,463,050	99%	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	105,504,000	105,408,971	100%	100.0%
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	123,512,000	123,357,494	100%	100.0%
6	Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur	67,000,000	49,880,000	74%	100%
7	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98,500,000	96,140,000	98%	100%
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	30,000,000	29,995,000	100%	100%
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	30,000,000	29,995,000	100%	100%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	22,500,000	22,500,000	100%	100%
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2,500,000	2,500,000	100%	100%
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5,000,000	5,000,000	100%	100%
3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5,000,000	5,000,000	100%	100%
4	Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran	5,000,000	5,000,000	100%	100%
5	Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun	5,000,000	5,000,000	100%	100%
V	Program Perencanaan Kerja	15,000,000	15,000,000	100%	100%
1	Penyusunan Rencana Kerja	2,500,000	2,500,000	100%	100%
2	Penyusunan Rencana Strategis	12,500,000	12,500,000	100%	100%
VI	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	55,000,000	53,746,950	98%	100%
1	Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektor Bidang Sosial	40,000,000	38,835,200	97%	100%
2	Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	15,000,000	14,911,750	99%	100%

Analisis atas pagu anggaran dan realisasi Belanja Langsung Non Urusan (BLNU) adalah sebagai berikut :

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, realisasi anggaran Rp. 1.545.000,- atau 77% dari pagu anggaran sebesar Rp.2.000.000,- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah materai dan buku cek.
2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, realisasi anggaran Rp 34,962,473- atau 65% dari pagu

- anggaran sebesar Rp. 53,400,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa telepon, listrik dan jasa layanan internet.
3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran Rp. 2.660.000 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. . 2,660,000- dan output dari kegiatan ini adalah pengisian Freon AC.
 4. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah, realisasi anggaran Rp. 19.546.625- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 20.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan yang diasuransikan.
 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, realisasi anggaran Rp. 11.979.300- atau 83% dari pagu anggaran sebesar Rp. 14.490.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK.
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, realisasi anggaran Rp. 112.682.000 atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 115.116.000 dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Petugas Kebersihan, Jumlah peralatan kebersihan.
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja, realisasi anggaran Rp. 24.719.000- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 25,020,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki.
 8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, realisasi anggaran Rp. 40.141.800- atau 99.98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 40.200.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah alat tulis kantor.
 9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, realisasi anggaran Rp. 19.325.500- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 19.680.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah barang cetakan; Jumlah penggandaan.

10. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, realisasi anggaran Rp. 6.000.000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 6.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
11. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran Rp. 30.370.300- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.616.500- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor.
12. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, realisasi anggaran Rp. 12.736.000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 12.360.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah alat rumah tangga yang disediakan.
13. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, realisasi anggaran Rp. 10.310.000- atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 10.640.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah penyediaan bahan bacaan; Jumlah iklan media massa.
14. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, realisasi anggaran Rp. 33.097.000- atau 99.99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 33,100,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah makanan dan minuman rapat; Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu dan harian pegawai.
15. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah, realisasi anggaran Rp. 241.616.058- atau 99.84% dari pagu anggaran sebesar Rp. 242.0.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
16. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan, realisasi anggaran Rp. 134.904.000- atau 99.95% dari pagu anggaran sebesar Rp. 134.968.000- dan output dari

kegiatan ini adalah Jumlah jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

17. Kegiatan Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai, realisasi anggaran Rp. 2.600.000- atau 95% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,750,000-. Dan output Kegiatan ini adalah Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai.

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Mobil Jabatan, realisasi anggaran Rp. 282.000.000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 282.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah kendaraan jabatan.
2. Kegiatan Pengadaan Meubelair, realisasi anggaran Rp. 28.371.200- atau 99.56% dari pagu anggaras sebesar Rp. 28.498.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Mebeuliar yang disediakan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, realisasi anggaran Rp. 79.463.050- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80,000,000- dan output dari kegiatan ini Jumlah paket pemeliharaan gedung kantor.
4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan, realisasi anggaran Rp. 105.408.971- atau 99.91% dari pagu anggaran sebesar Rp. 105.504.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan.
5. Kegiatan rutin/berkala kendaraan Dinas/opersional, realisasi anggaran Rp. 123.357.494- atau 99.87% dari pagu anggaran sebesar Rp. 123.512.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur, realisasi anggaran Rp. 49.880.000- atau 74% dari pagu anggaran sebesar Rp. 67.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah jasa prasarana aparatur.

7. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, realisasi anggaran Rp. 96.140.000- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 98.500.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor.

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, realisasi anggaran Rp. 29.995.000- atau 99.98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pakaian hari-hari tertentu.

IV. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasi anggaran Rp2,500,000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,500,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran, realisasi anggaran Rp. 5.000,000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan keuangan semesteran.
3. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, realisasi anggaran Rp. 5.000,000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.000,000,- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun.
4. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Semesteran, realisasi anggaran Rp. 5.000.000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan barang semesteran.
5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Barang Akhir Tahun realisasi anggaran Rp. 5.000.000- atau 100% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 5.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah pelaporan barang akhir tahun.

V. Program Perencanaan Kerja

1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja, realisasi anggaran Rp. 2,500,000-atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 2,500,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah rencana kerja yang disusun.
2. Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, realisasi anggaran Rp. 12,500,000- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp.12.500,000,- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Renstra yang disusun.

VI. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Sosial, realisasi anggaran Rp. 38.835.200- atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 40,000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Musyawarah Perencanaan Pembangunan Sektoral Bidang Sosial.
2. Kegiatan Sinergitas Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, realisasi anggaran Rp. 14.911.750,- atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.000,000,- dan output dari kegiatan ini Jumlah laporan triwulanan.

Sedangkan realisasi capaian keuangan program/kegiatan Tahun anggaran 2018 yang termasuk dalam belanja langsung urusan wajib/pilihan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Pagu Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Urusan
Wajib/Pilihan (BLUW/P) Tahun Anggaran 2018

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
I	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	2,241,630,000	2,097,956,441	94%	96.00%
1	Penanganan Orang Terlantar diperjalanan	60,630,000	54,643,852	90%	100%
2	Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	70,000,000	69,701,800	100%	100%
3	Penyelenggaraan rumah singgah	76,000,000	74,700,000	98%	100.00%
4	Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan	25,000,000	-	0%	0
5	Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat	80,000,000	76,658,400	96%	100%
6	Pembinaan bagi anak terlantar	80,000,000	79,620,888	100%	100%
7	Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya	1,300,000,000	1,263,817,435	97%	100%
8	Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia	80,000,000	79,781,000	100%	100%
9	Komisi Daerah Lanjut Usia	50,000,000	35,521,500	71%	100%
10	Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana	70,000,000	54,827,166	78%	100%
11	Sosialisasi Akseibilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat	100,000,000	99,427,000	99%	100%
12	Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo	200,000,000	193,964,400	97%	100%
13	Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018	50,000,000	15,293,000	31%	100%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
II	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	317,114,000	294,629,600	93%	100%
1	Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna	217,114,000	209,025,000	96%	100%
2	Kemah Bakti Karang Taruna	100,000,000	85,604,600	86%	100%
No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
III	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1,150,849,500	1,068,807,475	93%	100.00%
1	Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan	463,849,500	460,666,000	99%	100%
2	Pelatihan/Pembinaan Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	75,000,000	74,214,875	99%	100%
3	Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	62,000,000	55,227,250	89%	100.00%
4	Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK)	500,000,000	429,149,350	86%	100.00%
5	Pelayanan Terpadu Disabilitas	50,000,000	49,550,000	99%	100.00%
IV	Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal	250,000,000	220,801,500	88%	100%
1	Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial	50,000,000	44,480,000	89%	100%
2	Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan	200,000,000	176,321,500	88%	100%

No.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	FISIK
V	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	70,000,000	68,181,500	97%	100%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	70,000,000	68,181,500	97%	100%

I. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Kegiatan Penanganan Orang Terlantar dipergunakan, realisasi anggaran sebesar Rp. 54.643.852- atau 90% dari pagu anggaran sebesar Rp. 60.630.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah orang terlantar yang Jumlah orang terlantar yang melapor mendapatkan penanganan dan dipulangkan kedaerah asalnya.
2. Kegiatan Pelatihan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA), realisasi anggaran Rp. 69.701.800- atau 99.57% dari pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Anggota TAGANA Kota Tasikmalaya yang siap siaga dalam penanggulangan bencana.
3. Kegiatan Penyelenggaraan rumah singgah, realisasi anggaran Rp. 74.700.000- atau 98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rumah Singgah.
4. Kegiatan Sosialisasi Undang-undang Tentang Undian dan Pengumpulan Barang di Perusahaan, realisasi anggaran Rp. 0- atau 0% dari pagu anggaran sebesar Rp. 25.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Terpenuhinya pemahaman undang-undang tentang undian dan pengumpulan barang di perusahaan.
5. Kegiatan Pendampingan Bagi Penyandang Disabilitas Berat, realisasi anggaran Rp. 76.658.400- atau 96% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.000,000- dan output dari kegiatan ini Jumlah Penyandang Disabilitas yang di dampingi.

6. Kegiatan Pembinaan bagi anak terlantar, realisasi anggaran Rp. 79.620.888- atau 99.53% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Anak terlantar yang dibina.
7. Kegiatan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Tasikmalaya, realisasi anggaran Rp. 1.263.817.435- atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.300,000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Data PMKS yang Valid dan Update.
8. Kegiatan Pembinaan dan Pelayanan Home Care Lansia, realisasi anggaran Rp. 79.781.000- atau 99.73% dari pagu anggaran sebesar Rp. 80.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Lanjut Usia yang Mendapatkan Pelayanan Homcare.
9. Kegiatan Komisi Daerah Lanjut Usia, realisasi anggaran Rp. 35.521.500- atau 71% dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Lanjut Usia yang mengikuti Peringatan Hari Lanjut Usia.
10. Kegiatan Pembinaan dan Latihan Bagi Klien Melalui Panti dan Sasana, realisasi anggaran Rp. 54.827.166- atau 78% dari pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Remaja putus Sekolah yang Mendapat Pelatihan Keterampilan.
11. Kegiatan Sosialisasi Aksesibilitas dan Fasilitasi Alat Bantu Penyandang Cacat Serta Rehabilitasi dan Pendayagunaan Para Penyandang cacat, realisasi anggaran Rp. 99.427.000- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Alat Bantu yang diberikan.
12. Kegiatan Peningkatan Aksesibilitas Lanjut Usia/Jompo, realisasi anggaran Rp. 193.964.400- atau 97% dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Lanjut Uisa yang mendapat Akses Pelayanan dasar.
13. Kegiatan Bimbingan Teknis Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2018, realisasi anggaran Rp. 15.293.000- atau 31% dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah

Jumlah Yayasan yang mendapatkan Pemahaman tentang pengelolaan Bansos dan Hibah.

II. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Karang Taruna, realisasi anggaran sebesar Rp. 209.025.000- atau 96% dari pagu anggaran sebesar Rp. 217.114.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Karang Taruna Yang Mendapat Pemberdayaan/Pelatihan Perbngkelan .
2. Kegiatan Kemah Bakti Karang Taruna, realisasi anggaran Rp. 85.604.600- atau 86% dari pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Karang Taruna yang mengikuti Kemah Bhakti.

III. Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

1. Kegiatan Penyelenggaraan Unit Pengelola Program Keluarga Harapan, realisasi anggaran sebesar Rp. 460.666.000- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 463.849.500- dan output dari kegiatan ini adalah Terselenggaranya Fasilitas Untuk Unit dan pengelola Program Keluarga Harapan di Kota Tasikmalaya.
2. Kegiatan Pelatihan / Pembinaan Wanita Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, realisasi anggaran Rp. 74.214.875- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang berwirausaha.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Kesejahteraan Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) realisasi anggaran Rp. 55.227.250- atau 89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.000,000,- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah PSKS yang dibina.
4. Kegiatan Peningkatan Produktivitas dan Pendapatan Keluarga Berbasis Komunitas (P3KK), realisasi anggaran Rp. 429.149.350- atau

86% dari pagu anggaran sebesar Rp. 500.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang memiliki keterampilan pembuatan pakan ikan, pangkas rambut dan tata boga.

5. Kegiatan Pelayanan Terpadu Disabilitas, realisasi anggaran Rp. 49.550.000- atau 99% dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang memiliki keterampilan pembuatan pakan ikan, pangkas rambut dan tata boga

IV. Program Pemeliharaan Kantartibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal

1. Kegiatan Penerapan Standar pelayanan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Sosial, realisasi anggaran Rp. 44.480.000- atau 89% dari pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen ISO.
2. Penertiban Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan, realisasi anggaran Rp. 176.321.500- atau 88% dari pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Jumlah Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan yang ditertiban.

V. Program Pengelolaan Areal Pemakaman

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, realisasi anggaran Rp. 68.181.500- atau 88% dari pagu anggaran sebesar Rp. 70.000.000- dan output dari kegiatan ini adalah Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik . Penyusunan LKIP ini dilakukan melalui kompulasi data dan informasi dari bidang-bidang yang secara langsung menangani program dan kegiatan serta target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018.

Dalam pelaksanaan tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin melalui optimalisasi sumber daya yang tersedia pada Dinas Sosial Kota Tasikmalaya.

LKIP Dinas Sosial Kota Tasikmalaya Tahun 2018 menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 7 (tujuh) indikator kinerja berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018-2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Kota Tasikmalaya disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2018, dengan harapan laporan ini dapat digunakan sebagai kajian pimpinan maupun pemangku kepentingan lainnya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan yang akan dilaksanakan serta menjadi masukan perbaikan kinerja Dinas di tahun-tahun mendatang

Kepala Dinas Sosial Kota Tasikmalaya

Drs. H. NANA ROSADI, Apt, M.Si
NIP. 19600902 198902 1 001

